

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH DI BALI

I Gusti Agung Laksmi Swaryputri

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Universitas Dwijendra
email: laksmiastawa@gmail.com

I Wayan Aryawan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwijendra
email: aryawan@undwi.ac.id

I Gusti Agung Ngurah Kihasta Kaca Jenggala

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Universitas Dwijendra
email: turahjenggala11@gmail.com

I Gusti Ngurah Agung Maheswara Natha

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Universitas Dwijendra
email: wahis2019@gmail.com

Abstrak

Dengan adanya UU Nomer 14 tahun 2008 dan terbentuknya Komisi Informasi Pusat serta daerah maka akan ada keterbukaan informasi publik untuk masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh KI Bali dalam mendorong keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah di Bali dan memahami proses komunikasi organisasi internal dan eksternal serta komunikasi publik antara KI Bali, pemerintah daerah di Bali dan masyarakat Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian yakni Ketua, para komisioner dan staf KI Bali. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian strategi komunikasi KI Bali untuk mendorong keterbukaan informasi publik pada badan-badan publik pemerintah daerah Bali yaitu lewat kegiatan sosialisasi, visitasi dan verifikasi monev (monitoring dan evaluasi). Selanjutnya KI Bali melakukan edukasi ke badan-badan publik, masyarakat, dan mahasiswa. KI Bali juga menyelesaikan kasus-kasus dalam sidang sengketa informasi publik antara pemohon (pihak masyarakat umum atau lembaga swadaya masyarakat) dan termohon (pihak badan-badan publik di daerah Bali). KI Bali secara maksimal melakukan komunikasi organisasi internal dan eksternal serta komunikasi publik dalam mendorong keterbukaan informasi publik dengan keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran

Kata Kunci: strategi komunikasi, komisi informasi, keterbukaan informasi publik

Abstract

With the existence of the Law Number 14 the year 2008 and central with regional Information Commission (KI) were formed, there would be public information disclosure for the people. The objective of this research was to discover Bali Information Commission's (KI Bali) form of communication strategy that had been done to push public information disclosure by regional government in Bali and to understand the process of internal and external organization communication with public communication between KI Bali, regional government and the people of Bali. This research was using qualitative approach with subjects of the research who are the chairman, commissioners and staffs of KI Bali. The data was collected by interview, observation and documentation. Afterward the data was analyzed by using qualitative description. Based on the research, KI Bali's communication strategy to push public information disclosure on Bali regional government public agencies was through activities such as socialization, visitation and verification on monev (monitoring and evaluation). Moreover, KI Bali was educating public agencies, the people and university students. Furthermore, KI Bali had settling cases of public information dispute between the applicant (the general public or non-profit organization) and the respondent (Bali's public agencies). KI Bali did their duties to the max in internal and external organization communication include public communication toward pushing public information disclosure with limited human resources and budget.

Keywords: communication strategy, information commission, public information disclosure

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi (KI) Pusat dan daerah telah dibentuk dan diberi tugas serta wewenang untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Provinsi Bali atau KI Bali melakukan berbagai bentuk program kerja yang mendorong keterbukaan informasi publik pada badan publik pemerintah dan non-pemerintah. Permasalahan berada dimana badan-badan publik pemerintah daerah di Bali wajib menyiapkan informasi publik yang baik dan tepat sesuai undang-undang, hukum, etika, logik dan peraturan pemerintah. KI Bali menyiapkan strategi komunikasi yang efektif dan efisien agar badan-badan publik tersebut memenuhi standard layanan informasi publik nasional. Disisi lain banyak masyarakat yang belum paham tentang informasi publik. Permasalahan berikutnya KI Bali harus memahami dan menguasai komunikasi organisasi internal dan eksternal serta komunikasi publik untuk membantu mendorong keterbukaan informasi publik.

Wawasan pemecahan masalah berada dimana KI Bali memiliki wewenang secara teknis dalam mendorong keterbukaan informasi publik di badan-badan publik dengan berbagai bentuk. Tujuan UU No. 14 tahun 2008 adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan. KI Bali perlu menyiapkan rencana yang tepat dalam menjalani tugas-tugasnya dan memecahkan masalah dalam informasi publik agar lebih terbuka atau transparan serta bermanfaat untuk masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh KI Bali dalam mendorong keterbukaan informasi publik pada pemerintah di Bali. Cangara (2014: 72-74) ada lima tahapan dalam strategi komunikasi yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Keberhasilan KI Bali dalam kegiatan untuk mendorong keterbukaan informasi publik tergantung dari bentuk strategi komunikasi mereka ke badan-badan publik dan mengetahui informasi apa yang wajib. Mendorong keterbukaan informasi publik berarti mendesak supaya hal-hal informasi tentang badan publik, yang haknya masyarakat untuk mengetahui dan bisa mengakses informasinya sesuai jaminan hukum dari UU No. 14 tahun 2008, tidak dirahasiakan atau tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Tujuan kedua penelitian untuk memahami proses komunikasi organisasi internal dan eksternal serta komunikasi publik antara KI Bali, pemerintah dan masyarakat Bali. Dengan komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang tepat dan baik akan membantu mendorong keterbukaan informasi publik. Effendy (2012: 6) terdapat lima komponen atau unsur yang ada dalam komunikasi yaitu komunikator, pesan, komunikan, media atau saluran, efek dan ditambah lagi dua Cangara (2014: 115) timbal balik dan lingkungan. Dengan memahami tujuh komponen komunikasi tersebut KI Bali akan bisa lebih efektif melakukan komunikasi dengan badan publik dan masyarakat. Goldhaber (1986) definisi komunikasi organisasi sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah (Arni, 2014: 67-74). Komunikasi organisasi KI Bali bisa efektif jika mengikuti konsep tersebut, mengikuti peraturan pemerintah dan etika berorganisasi.

Komunikasi Internal yaitu komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang berada dalam suatu perusahaan (Yulianita, 2005: 92). Komunikasi internal dalam perusahaan, organisasi atau lembaga sangat rutin atau harian dilakukan demi mewujudkan sesuatu yang efektif dan efisien. Afdjani (2014: 126) menjelaskan proses komunikasi internal ini bisa berwujud komunikasi antarpribadi ataupun kelompok. Terdapat dua bentuk yaitu komunikasi vertikal (antara atasan dan bawahan) dan komunikasi horizontal (antara sesama jabatan di lembaga). Komunikasi eksternal adalah proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak diluar organisasi. Suranto (2005: 123-124) menjelaskan lebih lanjut media yang dipakai untuk komunikasi eksternal oleh organisasi atau kelompok seperti media cetak, radio, televisi, surat dan internet. Selanjutnya komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah banyak orang (khalayak) atau masyarakat seperti pidato formal (Mulyana, 2010: 82). Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi penting dalam bidang komunikasi organisasi dan komunikasi publik khususnya pola komunikasi dalam Komisi Informasi daerah dengan pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik demi kepentingan masyarakat. Strategi komunikasi KI Bali dalam mendorong keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah di Bali bisa membantu membangun kepercayaan masyarakat Bali terhadap pemerintahnya dan membangun negara lebih transparan, adil dan demokratis.

2. METODE

Penelitian dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 63 Renon, Denpasar, Bali. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan yang praktis yakni karena kantor KI Bali adalah tempat aktifitas rutin dalam perkantoran sehari-hari para anggota KI Bali, tempat pertemuan atau rapat KI Bali, dan mengetahui informasi kegiatannya dalam hubungan dengan pemerintah daerah di Bali dan para PPID. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif untuk mengkaji obyek penelitian tidak dalam bentuk angka-angka tetapi berupa narasi sesuai dengan hasil wawancara. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus berhubungan dengan KI Bali.

Informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan para komisioner serta staf KI Bali. Informan memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab berdasarkan SK gubernur Bali untuk melakukan kegiatan teknis keterbukaan informasi publik di Bali. Adapun informan yang diwawancarai sebanyak lima orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Koordinator Bidang-Bidang yang semuanya adalah para komisioner dan staf KI Bali yang juga pegawai senior Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali (Diskominfo). Untuk melakukan penelitian agar peneliti dapat memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, maka data penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu melakukan kajian berdasarkan induktif berarti menguraikan hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik atau kesimpulan umum. Kegiatan analisis data terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KI Bali terbentuk dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KI Provinsi merupakan lembaga independen yang berkedudukan di Provinsi dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Menurut Bapak Made Wirajaya (Ketua KI Bali) bahwa "KI Bali bertujuan dan berfungsi mengikuti visi dan misi gubernur Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang berarti melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. KI Bali mengikuti pada poin terakhir nomor 22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah." Berikutnya KI Bali berfungsi untuk melaksanakan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, mensosialisasikan dan petugas teknis terkait pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. KI Bali memiliki program kerja seperti sosialisasi informasi publik pasca sistem monitoring dan evaluasi (monev) 2022, pendampingan desa, dan monev 2023, serta memantau dan mengoreksi data-data yang dikeluarkan oleh badan publik daerah. Badan publik dari pemerintah Bali memiliki Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memberi laporan tahunan dan monev ke KI Bali. KI Bali bertugas mengawasi, menilai dan membina PPID mengikuti fungsi-fungsinya. Selain itu program kerja KI Bali agar adil dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Program kerja berikutnya untuk KI Bali adalah sosialisasi tentang monev dan visitasinya untuk konsultasi, verifikasi dan evaluasi ke badan-badan publik pemerintah dan non-pemerintah. Dalam melakukan monev biasanya salah satu komisioner dan staff KI Bali ketemu badan publik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah atau PPID yang akan diperiksa. Awalnya membentuk *Self Assesment Quesionairre (SAQ)* atau Penilaian Kuesioner Mandiri untuk badan publik menyusun dan diperiksa jawabannya. Sehabis perbaikan, KI Bali lakukan verifikasi dengan wawancara langsung, memberi peringkat monev, dan menyerahkan piagam peserta monev sesuai peringkat yang di peroleh. Penilaian badan publik lewat monev dengan angka dari 0 s/d 100, peringkat dari Kurang Informatif untuk dibawah 59, Cukup Informatif (angka 60 s/d 79), Menuju Informatif (angka 80 s/d 89) dan Informatif (90 s/d 100). Dalam Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 180/01/XII/KI.Bali/2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2022, secara umum terdapat total 249 badan publik yang menyeter monev 2022. Terdapat peringkat kurang informatif untuk tiga badan publik, cukup informatif untuk 27 badan publik, menuju informatif untuk 113 Badan publik, dan informatif untuk 104 badan publik, tetapi ada dua badan publik yang tidak dapat dinilai karena tidak menjawab SAQ. Selanjutnya ada nilai monev tertinggi badan publik diraih oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dengan nilai 95,89 dan nilai terendah diraih oleh Desa Celuk Kabupaten Gianyar dengan nilai 57,00.

KI Bali mengimplementasikan pola standard layanan informasi publik yang diatur didalam pedoman yaitu Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021. KI Bali menjelaskan informasi wajib dilaksanakan dan diumumkan secara berkala seperti: informasi tentang profil badan publik, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik, ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik, ringkasan laporan keuangan yang telah di audit, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik, informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik, informasi tentang pengadaan barang dan jasa, informasi tentang ketenagakerjaan, informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik.

Dalam observasi berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah sebuah kegiatan sosialisasi monev di ruangan serbaguna Desa Dinas Tegal Harum Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 18 April tahun 2023 dari jam 10.00 pagi sampai dengan jam 11.30 siang. KI Bali menunjuk Bapak Dewa Suardana (Wakil Ketua KI Bali) sebagai narasumber untuk kegiatan sosialisasi tersebut yang bertujuan agar Desa Dinas Tegal Harum bisa mempertahankan ranking tertinggi monevnya yang "informatif" dan meningkatkan keterbukaan informasi publiknya lewat media online seperti website dan media

Pembahasan tahapan strategi komunikasi KI Bali dalam mendorong keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah di Bali menyangkut penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan. Peneliti memahami KI Bali belum pernah melakukan penelitian terkait dengan keterbukaan informasi publik karena mereka lebih mengikuti rutinitas yaitu membantu, membina dan mengawasi badan publik dengan peraturan standard layanan informasi publik. Mereka sudah mengikuti standard KI daerah dengan penentuan ketinggian keterbukaan informasi publik lewat sistem monetaring dan evaluasi (monev) dengan arahan dari KI Pusat dan pemerintah termasuk IKIP.

Peneliti memahami KI Bali merencanakan mereka kegiatan-kegiatan sosialisasi ke badan publik dan masyarakat, mengawali dengan SAQ seterusnya visitasi monev ke badan publik pemerintah daerah di Bali, penyelesaian sidang informasi publik, seminar edukasi di kampus-kampus, dan

menerima konsultasi tentang informasi publik demi membantu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat. Selanjutnya mereka sudah merencanakan persediaan informasi publik lewat offline seperti media cetak dan talk show televisi serta media online atau jaringan internet seperti website, media sosial dan video streaming. Selanjutnya KI Bali telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendorong keterbukaan informasi publik. KI Bali telah mensosialisasikan monev ke badan-badan publik seperti PPID, OPD pemerintah, BUMD dan sebagian kecil dari desa dinas berada di Bali. Dalam pelaksanaan edukasi berbentuk seminar ke mahasiswa tahun lalu hanya beberapa kali. Disisi penyelesaian sengketa informasi publik sudah dilakukan dan hasil sudah dipublikasikan di website serta media cetak.

KI Bali dalam melaksanakan kegiatan yang mendorong keterbukaan informasi publik dievaluasi dari laporan tahunan yang dipresentasikan ke Gubernur dan Komisi 1 DPRD Bali, dan evaluasi kinerja keseluruhan dari peringkat Indeks IKIP untuk provinsi Bali. Dalam evaluasi kinerja KI Bali cukup bagus, tapi bisa ditingkatkan lebih karena masih ada banyak badan publik yang belum menyetor SAQ dan monev, belum ikut sosialisasi monev, belum memahami monev dan belum memberi maksimal informasi publik ke warganya seperti 636 desa dinas termasuk 1493 desa adat. Namun secara umum, evaluasi untuk mendorong lebih keterbukaan informasi publik, KI Bali memerlukan sumber daya manusia (sdm) untuk humas, tenaga ahli bidang hukum, staf Informasi Teknologi, staf umum dan sopir. Jugapula KI Bali perlu anggaran tambahan untuk sosialisasi dan visitasi monev ke ratusan badan publik seperti desa dinas, kegiatan edukasi dan seminar di kampus-kampus, dan kegiatan sosialisasi ke masyarakat langsung seperti di warga desa adat, serta sosialisasi lewat iklan di media massa atau media cetak. Dalam evaluasi peneliti melihat ada tercatat kendala dari PPID dan badan-badan publik dimana staf atau pegawai yang mengerjakan monev badan publik tersebut, kadang-kadang atau sering diganti atau mutasi yang membuat KI Bali sedikit mengulang visitasi atau pembinaan monev badan publik tersebut. Sesuai aturan Undang-Undang dan peraturan pusat maupun daerah KI Bali telah melaporkan semua kinerjanya dan program-program kerja, dan aktivitas untuk keterbukaan informasi publik setiap tahun ke Gubernur Bali dan Komisi I DPRD Bali.

Pembahasan berikutnya adalah pencapaian tujuan strategi komunikasi KI Bali dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Menurut Effendy (2012: 32) bahwa ada tiga langkah dalam tujuan strategi komunikasi secara umum adalah pertama memastikan untuk dipahami (*to secure understanding*), kedua menyatakan penerimaan (*to establish acceptance*) dan ketiga memotivasi untuk bertindak (*to motivate action*). Peneliti melihat KI Bali dalam bekerja untuk mendorong keterbukaan informasi publik harus mensosialisasikan, mengedukasikan dan memperantarakan antara dua belah pihak yaitu badan-badan publik di daerah Bali dan masyarakat. Pada badan publik peneliti melihat KI Bali telah secara keseluruhan memastikan kepada badan publik yang mereka bina, awasi dan nilai untuk memahami dan mengikuti prosedur serta PerKI Nomer 1 Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam mengisi monev, termasuk juga *e-government* untuk pelayanan informasi publik yang maksimal. PPID, OPD pemerintah, pemerintah dan non-pemerintah telah menyatakan menerima mengikuti arahan dari KI Bali dalam bentuk keterbukaan informasi publik sesuai monev dan *e-government*. KI Bali dengan sosialisasi, visitasi, pendampingan monev dan verifikasi monev telah memotivasi badan-badan publik untuk membuka informasi publik seluas-luasnya. Pada masyarakat peneliti melihat KI Bali telah mensosialisasikan keterbukaan informasi publik ke masyarakat agar memastikan pemahaman tentang undang-undang dan hak mereka. Masyarakat mulai menerima atau terjalin hubungan antara mereka dengan KI Bali dan badan publik, serta memotivasi masyarakat memakai informasi publik untuk kesejahteraannya dan mengetahui kebijakan publik.

Pembahasan lebih lanjut ke proses komunikasi organisasi internal dan eksternal serta komunikasi publik antara KI Bali, badan publik pemerintah daerah, dan masyarakat Bali dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Dalam komunikasi organisasi internal, peneliti dijelaskan bahwa KI Bali antara para komisioner biarpun ada Ketua atau Wakil Ketua, tapi sistem organisasi dan

komunikasi adalah kolektif kolegial. Jadi semua komisioner adalah sama atau *equal* dalam bentuk komunikasi dan dalam menentukan kebijakan KI Bali. Ketua KI Bali hanya mengkoordinasikan dan mewakili KI Bali. Untuk komunikasi dengan para staf dipakai komunikasi berbentuk semi karena para staf adalah pegawai dari Diskominfo Provinsi Bali. Dalam komunikasi organisasi eksternal KI Bali dengan pemerintah lebih melibatkan PPID provinsi dan daerah, OPD pemerintah dan perangkat desa dinas. Demi proses komunikasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik, PPID provinsi masuk dalam struktur organisasi bidang kelembagaan KI Bali. Komunikasi eksternal dengan badan-badan publik pemerintah dan non-pemerintah dilakukan pada waktu sosialisasi, visitasi, dan verifikasi di kantor badan publik tersebut, termasuk konsultasi bisa dilakukan di kantor KI Bali. Media komunikasi yang mereka pakai untuk menyiapkan jadwal dan lain-lain lewat telepon, HP dan *Whatsapp* group. Berikutnya komunikasi eksternal KI Bali ke masyarakat lewat tatap muka langsung dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta lewat media online. Dalam sosialisasi ke masyarakat langsung tatap muka atau lewat online zoom meeting, KI Bali belum kelihatan melakukannya. Jadi belum ada kegiatan langsung bertemu dengan masyarakat selain edukasi ke mahasiswa di kampus. KI Bali dan KI Pusat sudah menerima undangan dan mengikuti seminar atau sosialisasi ke publik sebagai narasumber di beberapa kampus di Bali, untuk memberi pemahaman tentang keterbukaan informasi publik dan hak masyarakat ke para civitas akademika dan mahasiswa.

Peneliti melihat demi mendukung untuk mendorong keterbukaan informasi publik, KI Bali telah melakukan berbagai bentuk dari komunikasi publik. Setiap sosialisasi dan seminar KI Bali sebagai narasumber utama telah menyiapkan komisionernya yang mewakilinya untuk memberi komunikasi publik yang efektif dalam tujuannya, materi-materi yang membantu badan publik dalam keterbukaan informasi publik, dan membuat hak masyarakat terpenuhi untuk membangun *trust* atau kepercayaan antara dua belah pihak (badan publik dan masyarakat). Para komisioner KI Bali sudah memahami komunikasi publik untuk bertujuan khusus yang sudah ditetapkan dan dinyatakan bersama dalam awal rapat-rapat internal mereka. Selanjutnya KI Bali berkomunikasi dengan publik lewat media online seperti website dan terus terupdate, tetapi sekarang sedang membentuk website yang lebih *uptodate* dan mengikuti *e-government*. Sehabis itu KI Bali sudah memposting kegiatan mereka di sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* dan membuat *Youtube* video serta streaming kegiatan dan program kerjanya demi keterbukaan informasi publik.

Peneliti dengan observasinya melihat para Komisioner dan para staf KI Bali cukup mampu dalam mendorong keterbukaan informasi publik termasuk mengikuti visi dan misi gubernur Bali dengan poin ke 22 untuk membuat badan-badan publik terbuka, transparan, dan akuntabel. Namun dari beberapa informan juga sebagai komisioner, menjelaskan waktu wawancara bahwa mereka merasa *overload* atau kelebihan pekerjaan dan perlu bantuan secepatnya. Ini berarti para komisioner yang akan melaporkan ke Gubernur Bali dan Komisi I DPRD Bali harus juga menyiapkan *reasonable reasoning* atau alasan yang tepat atau masuk akal agar mendapatkan bantuan dalam mencapai target keterbukaan informasi publik.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, maka bisa disimpulkan KI Bali melakukan berbagai strategi komunikasi dengan program kerjanya seperti sosialisasi ke badan-badan publik dan masyarakat, visitasi dengan monitoring dan evaluasi (monev) ke badan-badan publik pemerintah dan non-pemerintah, advokasi dan edukasi ke badan publik, masyarakat dan mahasiswa, serta melakukan sidang dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara pemohon seperti masyarakat atau LSM dan termohon badan publik. KI Bali belum pernah melakukan penelitian karena mereka mengikuti standard layanan secara peraturan pemerintah. Berikutnya KI Bali merencanakan semua program

kerja sesuai tahun-tahun sebelumnya, standard layanan informasi publik dan peraturan-peraturan yang diarahkan pemerintah. Tahap berikutnya KI Bali meneruskan pelaksanaan pokok strategi komunikasinya dengan fokus program kerja yang utama dan wajib yaitu sosialisasi SAQ dan visitasi monev ke badan-badan publik sebanyak mungkin dalam setahun, serta penyelesaian sengketa informasi publik yang adil dan tepat. Selanjutnya dalam tahap evaluasi, KI Bali melakukan rapat internal, menentukan hasil monev badan publik, dan hasil indeks IKIP dari KI Pusat. Pada tahap akhir KI Bali melakukan pelaporan semua kinerja mereka ke Komisi I DPRD Bali dan Gubernur Bali. Dan terus melakukan pelaporan ke masyarakat sebagai informasi publik lewat media cetak dan media online.

KI Bali terbantu oleh bentuk komunikasi organisasi internal yang lancar, efektif dan pekerjaan tim karena bentuk struktur PPID masuk dalam pembinaan langsung KI Bali sesuai peraturan dan undang-undang. Dalam komunikasi organisasi eksternal dengan badan-badan publik pemerintah dan non-pemerintah sudah dalam pencapaian yang cukup aktif dengan kegiatan sosialisasi dan visitasi yang rutin, serta kebanyakan para badan publik dapat peringkat yang menuju informatif dan informatif. Dengan bimbingan, binaan dan pengawasan KI Bali, badan-badan publik pemerintah daerah Bali sementara ini tidak memberi *misinformation* atau informasi yang tidak benar atau yang tidak tepat karena telah melakukan komunikasi eksternal yang cukup intensif. Dalam persidangan dan pemutusan sengketa informasi publik, KI Bali telah berkomunikasi cukup baik karena tidak ada komplain yang signifikan dari dua belah pihak. Berikutnya komunikasi KI Bali eksternal ke publik atau masyarakat sudah mencapai maksimal sesuai dengan kemampuan jumlah sdm dan anggaran. Dengan *professionalism* atau profesional dalam bidang informasi publik para komisioner yang dari berbagai unsur sarjana dan pascasarjana serta pengalaman cukup baik dalam melakukan *public speaking* atau keterampilan berbicara ke publik yang rapi dan tegas demi mencapai monev badan publik yang informatif, memberi haknya informasi publik ke masyarakat, dan melakukan edukasi ke mahasiswa. *Bottom line and Inconclusion* atau pada garis bawah dan kesimpulannya semua bentuk komunikasi strategi dengan bantuan komunikasi organisasi yang lancar dan komunikasi publik yang baik membuat KI Bali sekarang cukup efektif dan efisien dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Saran

KI Bali hendaknya merencanakan untuk lebih banyak sosialisasi dan melakukan monev ke semua desa dinas dan mulai menyentuh desa adat sebagai badan publik. Selanjutnya KI Bali hendaknya mengajukan proposal ke pemerintah untuk tambahan anggaran dalam sosialisasi dan sdm di bidang humas, ahli hukum dan informasi teknologi. Badan-Badan publik pemerintah daerah Bali hendaknya terus mengikuti arahan dari KI Bali, memperbaiki laporan monev, jangan terlalu sering ganti petugas yang input SAQ dan monev setiap tahun, mengikuti mengembangkan *e-government* dan membangun kepercayaan masyarakat dalam informasi publik. Masyarakat dan mahasiswa hendaknya meminta kegiatan sosialisasi dari KI Bali tentang informasi publik ke desanya atau meminta undangan untuk mengikuti waktu sosialisasi di desa dinas agar mengetahui haknya dan lebih berpartisipasi dalam kebijakan publik. Masyarakat dan LSM hendaknya terus memantau informasi publik dari badan-badan publik lewat websitenya dan lain-lain. Jika kurang puas atau kurang informatif, lalu minta konsultasi ke KI Bali dan ajukan prosedur untuk melakukan sengketa informasi publik serta mengikuti sidangnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afdjani, Hardiono. 2014. *Ilmu Komunikasi, Proses dan Strat.* Indigo Media. Tangerang.
Cangara, H. Hafield. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi.* Raja Grafindo. Jakarta

- Effendy, Onong Uchjana. 2012. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja RosdaKarya. Bandung.
- Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*. PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Suranto, AW. 2005. *Komunikasi Perkantoran: Prinsip Komunikasi Untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran*. Media Wacana. Yogyakarta.
- Yulianita, Neni. 2005. *Dasar-Dasar Public Relations*. Pusat Penerbitan Universitas (P2U). Bandung.